



MIGRASI ORANG JAWA KE ASAHAN PADA MASA KOLONIAL

Bayu Wicaksono*

Program Studi Magister Ilmu Sejarah, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

This article aims to reconstruct the history of Javanese migration to Asahan during the Dutch colonial period. The migration of Javanese to Asahan was the impact of the labor demand in the massive plantation industry sector on the East Coast of Sumatra. This study uses historical research methods using primary and secondary sources. The rapid development of plantations in Asahan made entrepreneurs bring in Javanese to sustain the company. To fulfill the needs of Javanese coolies, an agency was formed that has a special task of bringing in workers from Java Island. The life of the coolies is built with various facilities such as hospitals, cleanliness, housing, public kitchens, schools, and many others. Plantation entrepreneurs issue special monetary policies that aim to narrow the space for coolies by printing "kebon money" which only applies to plantations. The Javanese who migrated to Asahan were not able to achieve the hope of living a more decent life than their hometowns in their hometowns, they were instead caught in the trap of capitalists whose labor was exploited as coolies in remote areas of the plantation.

Keywords: Javanese; migration; plantation industry.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah migrasi orang Jawa ke Asahan pada masa kolonial Belanda. Migrasi orang Jawa ke Asahan merupakan dampak dari kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri perkebunan yang masif di Pantai Timur Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Pesatnya perkembangan perkebunan di Asahan, membuat para pengusaha mendatangkan orang Jawa untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk pemenuhan kebutuhan kuli Jawa, dibentuk sebuah badan yang memiliki tugas khusus mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa. Kehidupan para kuli dibangun berbagai fasilitas seperti rumah sakit, kebersihan, perumahan, dapur umum, sekolah dan masih banyak lainnya. Pengusaha perkebunan mengeluarkan kebijakan moneter khusus yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak para kuli dengan cara mencetak "uang kebon" yang hanya berlaku di perkebunan. Orang Jawa yang migrasi ke Asahan bukannya dapat meraih harapan untuk hidup lebih layak daripada di kampung halamannya, mereka malah terjebak di dalam perangkap kapitalis yang tenaganya dieksploitasi sebagai kuli di pelosok-pelosok perkebunan.

Kata Kunci: Orang Jawa; migrasi; industri perkebunan.

PENDAHULUAN

Mobilitas penduduk merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di suatu daerah, salah satunya adalah migrasi. Faktor masyarakat melakukan migrasi bisa disebabkan kepadatan penduduk, program pemerintah, dan yang paling utama adalah sosial-ekonomi. Adanya anggapan di daerah asal perekonomian mereka tidak berubah, maka cara yang efektif adalah pindah ke daerah lain. Meskipun, belum tentu adanya jaminan perubahan ekonomi lebih baik ditempat tinggal baru. Bisa dikatakan perpindahan yang terjadi merupakan suatu reaksi dari anggota masyarakat atas keadaan perekonomian yang pincang di daerahnya (Sjamsu, 1956, p. 1).

Pada abad 18-20 M, terjadi perpindahan penduduk yang dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan motivasi untuk mencari penghidupan lebih baik. Di sisi lain, dampak berkurangnya lahan dan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Hal tersebut menyebabkan terjadinya migrasi dari Jawa ke pulau lain yang masih jarang penduduknya yang berlangsung sejak abad ke-19 M. terdapat

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-01-16 | Revised: 2021-01-19 | Accepted: 2021-01-31 | Published: 2021-02-26

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Wicaksono, B. (2021). Migrasi Orang Jawa ke Asahan pada Masa Kolonial. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 54-62

CORRESPONDANCE AUTHOR: bayu_ransum@yahoo.com | DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3439>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

pula unsur politik atau kepentingan penguasa pemerintah, seperti pengeralahan tenaga kerja untuk perkebunan (Padmo, 1999, p. 56).

Sumatera Timur dikenal memiliki banyak perkebunan-perkebunan besar (*onderneming*) seperti tembakau, kopi, getah, dan lain-lainnya. Perkebunan tersebut merupakan milik pemerintah kolonial maupun swasta. Selama periode 1870-1900, Pemerintahan Kolonial Hindia menerapkan sistem ekonomi liberal (politik pintu terbuka) yang ditandai dengan dibukanya kesempatan sebesar-besarnya kepada pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya ke Hindia Belanda. Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 semakin menguatkan niat pemodal untuk membuka lahan secara besar-besaran dan digunakan untuk produksi industri perkebunan. Kebijakan sebelumnya adalah *cultuur stelsel* (tanam paksa), dimana pemerintah memegang hak penuh kontrol terhadap ekonomi sudah selesai masanya dan sudah ditinggalkan (Kartodirjo, 1991, p. 80).

Dengan banyaknya perkebunan yang dibuka di daerah Sumatera Timur, tentunya membutuhkan tenaga buruh dalam jumlah yang sangat besar. Untuk memenuhi hal tersebut, para pengusaha mendatangkan para buruh Cina, Tamil dan Jawa yang direkrut dari tempat asalnya masing-masing. Para pengusaha perlu mendatangkan buruh dari luar Sumatera Timur. Pada awalnya para buruh didatangkan dari Semenanjung Malaya, dalam perkembangan selanjutnya buruh didatangkan dari pulau Jawa. Karena alasan tersebut maka kolonisasi penduduk nantinya akan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kolonisasi pertanian dan kolonisasi buruh (Sjamsu, 1956, p. 57).

Asahan merupakan daerah yang dikelilingi oleh perkebunan karet milik perusahaan dari Amerika Serikat bernama Hollands Americanshe Plantage Maatschappij (HAPM) sejak era kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, HAPM mengalami perubahan menjadi PT. United States Rubber Sumatra Plantations (USRSP). Setelah saham perusahaan di akuisi oleh Uniroyal Inc. berganti nama menjadi PT. Uniroyal Sumatra Plantations (USP) tahun 1985. Pada 1986, PT. Bakrie & Brothers dengan mengambil alih kepemilikan 75% saham USP dan berganti nama menjadi PT. United Sumatra Plantations (UNSP). Selanjutnya, nama UNSP mengalami perubahan menjadi PT. Bakrie Sumatra Plantations (BSP) dan karet tidak lagi menjadi komoditas utama. Belakangan, perusahaan ini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1992 hingga kini (Annual Report 2015).

Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis yang berkaitan dengan politik balas budi terhadap pendidikan pribumi, memperbaiki pertanian serta mengurangi kepadatan penduduk. Dalam menerapkan program tersebut, pemerintah harus melakukan banyak propaganda serta bujukan-bujukan agar rakyat mau pindah. Dari gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa masalah kependudukan rakyat di Jawa pada masa itu belum begitu mendesak untuk mendorong mereka melakukan perpindahan ke daerah lain. Namun, permasalahan yang membuat masyarakat Jawa melakukan perpindahan ke luar Pulau Jawa didasari adanya kebutuhan yang mendesak dari perusahaan-perusahaan besar milik kaum kapitalis di daerah seberang akan kebutuhan buruh untuk ditempatkan (Hutauruk, 2020, p. 114).

Dengan tumbuh dan berkembangnya perkebunan di Asahan, membuat pihak Kolonial membutuhkan buruh sebagai tenaga kerja untuk menunjang keberlangsungan industri tersebut. Secara teori, atas permintaan para pengusaha *onderneming* yang bersangkutan, maka wajib bagi mereka untuk mengembalikan para buruh itu ke tempat asal saat masa kontrak telah berakhir. Setelah puluhan tahun, ribuan orang Cina dan Jawa lebih memilih tetap tinggal setelah selesai masa kontrak sebagai buruh-buruh. Kebanyakan diantara mereka bermukim di kampung maupun di kota yang dalam fase berkembang (Pelzer, 1985, p. 84).

Ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji terkait sejarah suku pendatang jumlahnya lebih banyak dari pada suku asli. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang orang Jawa

tertarik migrasi ke luar pulau Jawa dan mendeskripsikan kehidupan orang Jawa di Asahan masa kolonial. Dengan demikian, artikel ini menjelaskan tentang sejarah kedatangan orang Jawa ke Asahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, sehingga akan menghasilkan suatu karya yang bersifat ilmiah. Metode itu sendiri berarti suatu cara, prosedur atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien (Daliman, 2012, p. 27). Metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan bahan-bahan yang diteliti. Data yang akan dikumpulkan berupa data tentang perkebunan, sejarah kota, dan migrasi masyarakat Jawa yang mendiami Asahan. Oleh karena itu pengumpulan sumber-sumber dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Sjamsuddin, 2007, p. 11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Asahan dan Pembukaan Perkebunan Kolonial

Sebelum ditetapkan menjadi Kabupaten Asahan pada tahun 1946, Asahan termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Asahan. Wilayahnya diperintah oleh Sultan Asahan. Namun, tanggal 12 september 1865 Kesultanan Asahan berhasil ditaklukan oleh Belanda. Kemudian, menetapkan pembentukan Afdeling Asahan yang berpusat di Tanjung Balai sesuai dengan keputusan tanggal 30 September 1867. Belanda membagi wilayah pemerintahan Afdeling Asahan menjadi tiga yakni: *Onderafdeling* Batubara; *Onderafdeling* Asahan; *Onderafdeling* Labuhan Batu.

Belanda menganggap Asahan harus takluk di bawah kontrol mereka karena berniat mengamankan kepentingan bisnis kalangan pengusaha perkebunan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keuangan dan keuntungan negeri Belanda. Keberhasilan penanaman tembakau yang sedang diusahakan di Deli, membuat Belanda menyusun strategi yang tepat untuk memperluas dan menancapkan pengaruhnya di wilayah Sumatera Timur yang masih merdeka tidak terkecuali Asahan (Butar-Butar, 2019, p. 30).

Sebelum perkebunan didirikan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan sensus penduduk. Hal tersebut bertujuan untuk menetapkan jumlah rumah tangga, di mana masing-masing dapat meminta empat *bau* (hektar) dari ladang huma itu untuk mereka sendiri. Langkah berikutnya adalah membuat garis pemisah antara kampung dengan lahan pertanian yang dipisahkan dari tanah *onderneming*. Setelah semua proses dilakukan barulah proses pembukaan dan penanaman dapat dimulai. Banyak dari *onderneming* karet dan kelapa sawit yang ada sekarang, merupakan peralihan dari perkebunan tembakau. Hal ini disebabkan saat memperoleh lahan-lahan tersebut, para pengusaha perkebunan tidak mengetahui hanya tanah antara Sungai Wampu dan Sungai Ular yang yang dapat ditanami tanaman tembakau dan bukan tanah-tanah liparitik yang berada di selatan. Salah satunya milik perusahaan karet Amerika Serikat di Kisaran, mulanya merupakan *onderneming* tembakau beralih ke tanaman karet (Pelzer, 1985, p. 72).

Hamester menyebutkan penduduk di Asahan terdiri dari orang-orang Batak, dan di daerah pesisir terdiri Melayu, Cina, Jawa, Aceh, Minangkabau, Banjar, Keling, Mandailing. Mereka tersebar dan bertempat tinggal didaerah perkampungan seperti Kota Pinang, Kampung Mesjid, Negeri Lama, Sungei Berombang, Tanjung Pasir, Bagan Asahan, Bandar Pulau, Indrapura, Merbau, Labuhan Roekoe, Kisaran, Tanjung Tiram, Labuhan Bilik, Tanjung Balai (Hamerster, 1981, p. 73).

Tabel 1. Klasifikasi Populasi di *Afdeeling Asahan* Berdasarkan Ras dan Jenis Kelamin, 1930

Onderafdeeling	Populasi menurut ras, dalam % dari total					Jumlah perempuan & laki-laki per 1.000				
	Pribumi	Eropa	Cina	Timur Asing	Total	Pribumi	Eropa	Cina	Timur Asing	Total
Batubara	93,20	0,30	5,79	0,71	100	868,69	540,32	493,96	592,98	838,57
Asahan	91,66	0,50	7,14	0,70	100	865,67	696,74	426,37	515,06	821,75
Labuhanbatu	91,62	0,36	7,76	0,26	100	792,41	605,86	291,73	463,11	738,33
<i>Afdeeling Asahan 1930</i>	92,92	0,41	7,14	0,53	100	836,03	639,76	373,06	523,28	790,16
<i>Afdeeling Asahan 1920</i>	92,52	0,30	6,74	0,35	100	800,51	484,19	182,43	251,93	735,20

Sumber: (Volkstelling 1930, 1935).

Sistem perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem perekonomian komersial yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda atau yang didirikan oleh perusahaan kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa yang berbeda dengan sistem kebun yang telah lama berjalan di wilayah nusantara pada masa pra kolonial. Sebagai sistem perekonomian perkebunan baru, sistem perkebunan besar (*onderneming*) telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem dalam sistem perekonomian perkebunan yang membawa dampak perubahan yang sangat penting terhadap masyarakat di wilayah tanah jajahan seperti Indonesia (Kartodirdjo, 1991, p. 3).

Industri perkebunan di Sumatera Timur yang dimulai sejak era Nienhuys dengan Deli Maatschappij. Komoditas tembakau mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa tahun setelahnya, terutama sejak era J.T. Cremer memimpin Deli Maatschappij. Perkembangan perkebunan tembakau yang pesat menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha yang tertarik untuk menanamkan modal di Sumatera Timur (Muhajir, et al, 2020). Pada tahun 1872 sudah terdapat 13 perkebunan di Deli, 1 di Langkat dan 1 di Serdang. Pada akhir tahun 1872, di Deli telah menjadi 44 perkebunan dan tahun 1873 dibuka perkebunan *Annidale* dan *Kesawan*. Perkebunan *Petersburg* dibuka tahun 1874, perkebunan *Boedra* tahun 1876 serta perkebunan lainnya. Sampai tahun 1884 terdapat tambahan 12 perkebunan baru yaitu Mariendal Medan, Peterbugs, Tanjung Jati, Bandar Khalipah, Deli Tua, Kwala Begumit, Bekala, Belawan, Lubuk Dalam, Buluh Cina dan Kota Limbaru (Ghani, 2016, p. 41).

Semua ini berkat diberlangsungkannya *Agrarische Wet* tahun 1870 yang membolehkan perusahaan swasta memperoleh konsesi jangka panjang. Setelah Deli Maatschappij berdiri selama dua puluh lima tahun, maka tahun 1884 telah bertambah luas pengembangan komoditas tembakau menjadi 76 perkebunan. yang telah tersebar di beberapa daerah seperti 44 di Deli, 20 di Langkat, 9 di Serdang, 2 di Bedagai, dan 1 di Padang. Sejalan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan terus meningkat maka Deli Maatschappij juga mengembangkan komoditas karet, kopi, lada dan kelapa sawit. Dan para pemodal swasta semakin banyak menanamkan modal dengan membuka perkebunan selain tembakau yakni karet, teh, dan kelapa sawit mulai dikembangkan.

Perkebunan karet pertama di dirikan oleh perusahaan Inggris yakni Harrison and Crosfield di daerah kesultanan Serdang pada tahun 1902. Pada tahun 1909 mulailah didirikan di Deli yakni Deli Batavia Rubber Maatschappij. Jarak waktu 1909 dan 1914 ada kembali dua perusahaan perkebunan karet di Sumatera Timur yaitu United States Rubber Company di Asahan dan Goodyear Rubber Company di Simalungun. Terdapat juga perkebunan kelapa sawit yang mulai dibangun pada tahun 1911 di Pulau Raja, Asahan. Bersamaan dibuka perkebunan teh mulai dibudidayakan di wilayah Simalungun. Dua puluh tahun kemudian dua komoditas terakhir ini menjadi komoditas utama karena kelapa sawit meningkat dari 2.600 hektar 1915 menjadi 60.000 hektar tahun 1930. Produksi karet juga mengalami peningkatan dari 6.432 ton menjadi 77.535 ton. Perkebunan teh tahun 1915 ditanam seluas 3.237 hektar kemudian menjadi 21.588 hektar pada tahun 1938 (Ghani, 2016, pp. 43-44).

Awalnya dibagian selatan Sumatera Timur ditanami perkebunan tembakau, namun ternyata hasilnya mengecewakan, ditanam tanaman kopi dan hasilnya sama. Pada akhirnya dicoba ditanam tanaman karet awalnya ditanam kira-kira 10.000 pohon, tetapi sebelum karet pertama menghasilkan konsesi itu berganti tangan dua kali dan akhirnya menjadi milik PT Sumatra Para Rubber Plantations Ltd. Perusahaan Swiss lainnya dalam tahun 1899 melakukan penanaman karet percobaan di Asahan dalam tahun 1906. Dalam kurun waktu itulah masa percobaan penanaman karet di Sumatera Timur. Setelah diteliti hasilnya sangat memuaskan barulah pembukaan perkebunan karet menggantikan perkebunan tembakau dan kopi yang tanahnya tidak cocok di tanah-tanah liparitik Sumatera Timur (Pelzer, 1985, pp. 74-75).

Sebagian besar konsesi-konsesi perkebunan tembakau di *Afdeling* Asahan beralih ke tanaman lain seperti karet pada tahun 1908. Selain tanaman karet, jenis tanaman lain yang ditanam adalah tanaman gambir (Knappert, 1908). Setelah kegagalan budidaya tembakau di Asahan, yang produknya tidak dapat bertahan seperti di Deli dan Langkat, beralih fokusnya adalah pada karet dan dengan hasil yang baik. Pada tahun 1924 Asahan telah menghasilkan lebih dari sepertiga dari total produksi karet di Pantai Timur. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga menjanjikan seperti karet. Dengan area dengan luas sekitar 12.000 ha dalam waktu dekat akan ditanami tanaman budidaya tersebut, yang diharapkan dapat menghasilkan produksi yang sangat besar. Permintaan tanah di Asahan meningkat tajam dalam dua tahun terakhir (Hamerster, 1981, p. 199).

Perusahaan karet baru bermunculan, sebagian didorong oleh modal asing. Perusahaan karet terbesar dan yang paling luas adalah *Hollandsch-Americanhe Plantage Maatschappij* (HAPM), karena harga bahan bakunya yang tinggi, memutuskan untuk menanam karet sendiri, pada tahun 1910 dan 1911 ia membeli tanah yang bersebelahan, terhubung dengan jalan raya, yaitu tanah konsesi yang dulunya digunakan oleh perusahaan tembakau *Nieuw Asahansche*. HAPM tidak sulit lagi dengan membuka hutan, tetapi hanya dengan mengganti produksi dari tembakau ke karet. Setelah menambah personil dari kalangan orang-orang Eropa yang telah berpengalaman, maka berdirilah *Hollandsch Americanshe Plantage Maatschappij* tersebut (Lekkerkerker, 1916, p. 259).

Sampai pada tahun 1915, hanya tersisa dua perkebunan tembakau di Asahan. Selebihnya mulai terkikis dengan semakin bertambah dan beralih ke perkebunan karet. Pada tahun 1918, perkebunan tembakau terakhir di Asahan yakni *Hessa Tabak Maatschappij* resmi gulung tikar (Broersma, 1922, p. 98).

Tabel 2. Perusahaan dan Lokasi Perkebunan di *Onderafdeling* Asahan, 1924

No	Perusahaan	Lokasi Perkebunan
1	Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij	Air Putih; Gurach Batu; Kisaran; Kuala Piasa; Pulau Bandring; Sei Bunut; Pondok Panjang; Serbangan; Sei Balai; Tanah Raja; <i>Colt Estate</i>
2	Rubber Cultur Maatschappij Amsterdam (R.C.M.A)	Sungai Dadap; Sungai Silau; Sentang; Pulu Raja; Bandar Selamat; Air Batu; Sungai Alim
3	Societe des Plantations de Teluk Dalam	Teluk Dalam
4	Gunung Melayu Plantagen Gessellschaft	Gunung Melayu; Negaga; Simpang Toba; Simpang Toba A; Aek Kuasan; Aek Kuasan A; Sungai Piring
5	Bandar Rubber Maatschappij Cie des Coutschous de Padang	Bandar Pulau; Piasa Ulu; Teluk Manis
6	Sumatra Industrial Company Ltd	Silau Tua; Pulau Mandi
7	Maatschappij voor Onderneming in Nederlandsch Indie	Sei Raja
8	Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij Serbajadi	Sei Kopas
9	Sukaraja Cultuur Maatschappij	Sukaraja
10	Haboko Tea Company Ltd	Haboko
11	Koloniale Cultuur Cie	Pulahan
12	Rubber Maatschappij Ambalutu	Ambalutu
13	Hessa Rubber Maatschappij	Hessa
14	Continental Plantation Company	Huta Padang
15	Asahan Cultuur Maatschappij	Aek Loba; Aek Nabuntu; Padang Pulau

Sumber: (Hamerster, 1981, pp. 142-144)

Tabel 3. Perusahaan dan Lokasi Perkebunan di *Onderafdeling* Batu Bara, 1924

No	Perusahaan	Lokasi Perkebunan
1	Cultuur Maatschappij Dania	Dania
2	Amalgamated Rubber Estate Ltd	Dolok Taloean Saragih
3	Hawaiian Sumatra Plantations Ltd	Kuala Gunung
4	Cie des Caoutchoues de Padang	Lima Puluh; Tanah Gambus
5	Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (R.C.M.A)	Limau Manis
6	Cultuur Maatschappij de Oostkust	Tanjung Kuba
7	Deli Olieslagerij Maatschappij	Lidah Tanah
8	Mendaris (Sumatra) Rubber & Prod Estate Ltd	Laut Tador
9	Laras (Sumatra) Rubber Estate Ltd	Petatal
10	Maatschappij Tot Exploitatie der Tjong A Fie Landen	Pematang Jering
11	Nanyo Yonnu Kaisha Ltd	Tanah Hitam Hilir
12	Asahan Rubber Estate Ltd	Sei Bejangkar
13	Bahlias Rubber Estate Ltd	Sei Brohol
14	Tabak Maatschappij Arendsburg	Sei Simunjur
15	Si Pare-pare Rubber Maatschappij	Si Pare-pare
16	Tanjung Rubber Company Ltd	Tanjung Kassau; Tanjung Merah
17	Tanah Datar Rubber Estate Ltd	Tanah Datar

Sumber: (Hamerster, 1981, pp. 144-147)

Kuli Kontrak Jawa

Pada awal perkebunan di Sumatera Timur, kebutuhan kuli dapat dipenuhi dengan mendatangkan kuli Cina dan India dari Semenanjung Malaya melalui jasa perantara pencari tenaga kerja (*Broker, werver* atau *werek*). Kedatangan kuli Cina dan India sebagian besar dikarenakan termakan bujuk rayu para perantara yang menjanjikan upah tinggi (Ghani, 2016, p. 63).

Asosiasi Pengusaha Perkebunan Deli Planters Vereeniging (DPV), pada tahun 1888 membentuk biro imigrasi yang mengurus rekrutmen, pengangkutan dan pembiayaan pengerahan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha perkebunan di Sumatera Timur kelak menjadi salah satu fungsi dari lembaga *Algemeene Vereeniging voor Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* (AVROS). DPV didirikan mengatasi dan mengontrol pemenuhan kebutuhan tenaga kerja (kuli). Badan ini memiliki anggota dari semua jenis perusahaan perkebunan guna pengembangan fungsi dan tugas dari organisasi itu sendiri. AVROS sebagai organisasi perkebunan yang didirikan atas dasar-dasar terdapat banyak kepentingan yang sama dalam persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan serta majunya teknologi transportasi, seperti Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Dengan demikian, pada dasarnya AVROS sangat memegang peranan penting dalam membantu meringankan tanggung jawab perkebunan yang menjadi anggotanya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan lahan yang diperlukan untuk kemajuan perkebunan (Indera & Suprayitno, 2004, p. 7).

Perkembangan perkebunan yang luar biasa pesat menyebabkan pihak *onderneming* membutuhkan banyak pekerja, akan tetapi perkembangan selanjutnya tidak mudah untuk mencari pekerja dari semenanjung (kuli Cina dan India), sehingga pada akhir abad ke-19 sumber tenaga kerja migran mulai bergeser dari daratan Cina ke pulau Jawa. Penggunaan tenaga kerja dari pulau Jawa telah menjadi tulang punggung perkebunan di tahun-tahun yang akan datang (Ghani, 2016, p. 64).

Sejak industri perkebunan karet meningkat, tenaga kerja dari Jawa diperoleh dari agen-agen perusahaan perkebunan yang berdiri sendiri. Kuli-kuli kontrak tersebut yang berasal dari Jawa diberangkatkan dengan menggunakan kapal dagang yang singgah di Sumatera Timur. Saat perkembangannya semakin pesat dan kuli-kuli kontrak tersebut semakin banyak jumlahnya berbeda dengan saat dibukanya perkebunan tembakau. Hal ini dimungkinkan karena jenisnya berlainan seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz yakni bahwa perkebunan karet merupakan salah satu

perkebunan yang harus dikelola dengan tenaga kerja yang banyak serta dana yang besar (Indera & Suprayitno, 2004, p. 8).

Untuk memperkuat kelembagaan perekrutan tenaga kerja ke perkebunan Sumatera Timur maka AVROS membentuk Java Immigraten Bureau (JIB) pada tahun 1912 yang memiliki tugas khusus mendatangkan tenaga kerja dari Jawa. Kemudian dibentuk juga Algemeene Delish Emigratie Kantoor (ADEK) untuk mengerahkan mobilisasi pekerja migran. Pegawai AVROS yang bertugas di pulau Jawa, pernah bertugas untuk mencari jumlah calon kuli sekitar enam ribuan untuk dipekerjakan di perkebunan di Asahan. Terdapat juga agen-agen tidak resmi yang berlalu-lalang di Jawa untuk mencari calon kuli. Terkadang mereka bertindak di luar batas seperti menipu maupun menculik (Ghani, 2016, p. 65).

Orang-orang Jawa di datangkan dari pulau Jawa sebagai calon pekerja perkebunan yang dibawa oleh kapal yang bersandar di pelabuhan Belawan, sebelum disebarkan di perkebunan Sumatera Timur. Di sana mereka akan diperiksa kesehatannya barulah setelah melewati pemeriksaan kesehatan mereka dikirim ke Kisaran (*“Koelies voor Asahan”*). Pada tahun 1930, sekitar 60 tahun setelah perkebunan di Langkat, Deli dan Serdang, serta hampir 30 tahun setelah pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Asahan, jumlah penduduk asli Sumatera Timur di semua wilayah administratif yang utama, kecuali wilayah Karo, telah dilampaui oleh pendatang-pendatang dari luar daerah. Data di bawah ini jumlah populasi di wilayah Asahan, orang-orang Jawa lebih banyak jumlahnya daripada etnis asli (Pelzer, 1985, p. 84).

Tabel 4. Populasi Kuli Kontrak di Asahan Tahun 1912

No.	Suku	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tionghoa	3994	-	3994
2	Jawa	5633	1477	7110
3	Klingen	87	-	87
4	Banjar	165	-	165
Total Kuli Kontrak				11356

Sumber: (Deli Courant, 1914).

Tabel 5. Populasi di *Onderafdeeling* Asahan berdasarkan suku, 1930

No.	Suku	Jenis Kelamin		Total	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Melayu	17.114	17.142	34.256	28,82
2	Minangkabau	701	554	1.255	1,06
3	Jawa	28.434	23.528	51.962	43,71
4	Batak Karo	6	3	11	0,01
5	Batak Angkola	234	166	400	0,34
6	Batak Mandailing	2.021	1.817	3.838	3,23
7	Batak Pak-Pak	9	4	13	0,01
8	Batak Toba	9.302	7.813	17.115	14,40
9	Batak Lainnya	281	238	519	0,44

Sumber: (Volkstelling 1930, 1935).

Pada dasarnya kuli Jawa yang bekerja di Asahan mengikuti arahan dari atasannya, mereka bersedia bekerja apapun. Kebanyakan mereka bekerja di perkebunan, namun di Asahan mereka juga bekerja sebagai petani. Asahan yang terkenal dengan salah satu sumber padi di Sumatera Timur membutuhkan pekerja Kuli Jawa untuk menggarap tanah ditanami padi tersebut (Broersma, 1922, p. 255).

Gaji dari bekerja tersebut tidaklah besar, dan tidak pernah mengalami kenaikan selama 30 tahun, bahkan upah buruh wanitanya menurun hampir 20% selama 1913-1940. Upah yang rendah dari

buruh diperkebunan karet juga disebabkan oleh fluktuasi harga ekspor karet yang sulit diramal. Upah buruh laki-laki sekitar 40 sen per hari, sedangkan buruh perempuan sekitar 35 sen per hari. Semua berkenaan dengan upah ditentukan oleh AVROS dan DPV. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya persaingan serta terdapat keseragaman upah antara perkebunan (Mubyarto & Dewanta, 1991, p. 143).

Di lain pihak, pengusaha perkebunan juga mengeluarkan uang khusus pada setiap perkebunan, karena pada waktu itu di Sumatera Timur sedang kekurangan mata uang. Hal ini menjadi strategi pihak perkebunan, agar para kuli hanya bisa menggunakan uangnya di beberapa perkebunan saja. Strategi ini juga dimaksudkan oleh pihak pengusaha perkebunan untuk mempersempit ruang gerak para kuli. Maka dicetaklah yang namanya “uang kebon”. Dalam praktiknya, para pengusaha perkebunan memberikan upah kepada para kuli dengan uang yang mereka buat sendiri dari kertas atau kepingan logam, yang hanya dipergunakan di unit usaha milik perkebunan tersebut. Cara seperti ini membuat kuli tidak bisa menabung hasil kerjanya untuk di masa depan, yang membuat kemelaratan para kuli tidak dapat dihindarkan.

Setiap perkebunan memiliki sistem yang berbeda terhadap pekerjaannya, seperti yang terjadi di Pulau Mandi, perusahaan milik Jepang yang terkenal kejam dengan berbagai penyiksaan terhadap kuli Jawa. Namun, setelah peristiwa tersebut, perkebunan mereka melakukan perombakan besar di jajaran pimpinannya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perkebunan HAPM merupakan salah satu perkebunan yang memiliki tingkat pelayanan yang baik. Bahkan, perusahaan perkebunan HAPM sangat memperhatikan bagaimana kehidupan para kuli, terdapat berbagai fasilitas seperti rumah sakit, kebersihan, perumahan, bahkan sekolah dan masih banyak lainnya (Elout, 1930, p. 25).

Terdapat 6 sekolah wirausaha di Dolok Taloen Saragih, Pangkattan, Brussel, Pernantian, Piasa Oeloe dan Poelahan dengan kurang lebih 136 siswa. Perkebunan Haboko menunjukkan karakter orang Jawa asli. Seluruh kampung itu, tertata rapi secara alami dan terawat, dengan drainase dan pembuangan limbah yang baik, dengan rumah-rumah yang bersih dan rapi. Dan setiap orang merasa nyaman di lingkungan yang murni Jawa ini (Hamerster, 1981, p. 27). Beras dijual kepada kuli dan makanannya diserahkan sepenuhnya pada dirinya sendiri, namun di kompleks perusahaan karet yang besar tersebut dan terus menerus sepanjang waktu, seperti di Asahan, banyak persediaan sehari-hari yang mahal dan sulit didapat. Ini telah dipenuhi oleh HAPM melalui dapur pusat. Biaya makanan pokok ini tidak gratis tetapi dipotong dari gaji kuli (Straub, 1928, p. 188).

Pemukiman dan pekerjaan kuli di Asahan bertempat di hutan belantara, yang jelas banyak sumber penyakit, hal ini dikarenakan malaria maupun penyakit lainnya seperti tertusuk duri maupun ranting. Bagi perusahaan jika mereka sakit akan menyebabkan terkendalanya hasil produksi. Oleh karena itu diperkebunan terdapat dokter, dengan perkembangannya terdapatlah sebuah rumah sakit (Straub, 1928, p. 9-10). Pelayanan kebersihan dan medis untuk para kuli sangat diperhatikan di HAPM, hal ini mengingat untuk pembentukan calon kuli dari anak-anak kuli. Pihak perkebunan selalu memeriksa kesehatan untuk para anak-anak kuli di HAPM. Rumah sakit perkebunan di Asahan digunakan untuk para kuli yang terserang penyakit, seperti malaria, ataupun lainnya seperti serangan binatang buas (Knappert, 1908).

SIMPULAN

Migrasi orang Jawa ke Asahan terjadi sangat masif pada era “*booming* karet” awal abad ke-20. Asahan hanya salah satu dari banyak daerah Sabuk Perkebunan Pantai Timur Sumatera Utara yang menjadi destinasi rekrutmen kuli oleh perusahaan-perusahaan swasta. Koloniasasi buruh tersebar ke berbagai penjuru dan pinggir-pinggir *onderneming* sehingga menjadi kampung-kampung baru yang membentuk kehidupan orang Jawa di Asahan. Sejak puluhan ribu orang Jawa memenuhi kantong-kantong perkebunan, sejak itu pula sensus penduduk menetapkan suku Jawa sebagai mayoritas

dibandingkan suku-suku asli setempat (orang Melayu). Populasi orang Jawa tumbuh dan berkembang dengan dinamikanya sendiri dan keberadaannya sangat menonjol. Orang Jawa telah mengalami sangat banyak pengalaman pahit dalam sejarah kolonial dan industri perkebunan. Sejak Indonesia merdeka, orang Jawa meraba jalan barunya untuk menata hidup dan pelan-pelan menemukan jalan alternatif bertahan atau keluar dari perkebunan dengan hak dan kebebasan dalam genggamannya.

REFERENSI

- “Beschrijving Centraal Koelie-Hospitaal Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij Asahan, Oostkust van Sumatra.” (1914). *Deli Courant*.
- “Koelies Voor Asahan.” *De Sumatra Post*.
- Annual Report 2015 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk*. (2015). Kisaran: PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
- Broersma, R. (1922). *Oostkust van Sumatra*. Batavia : De Javasche Boekhandel.
- Butar-Butar, S. D. (2019). “Perkembangan Afdeling Asahan Tahun 1867-1942”. *Master Thesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Department van Economische Zaken (1935). *Volkstelling 1930. Deel IV: Inheemshe Bevolking van Sumatra*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Elout, C. K. (1930). *De Grootte Oost*. Den Haag: W.P. van Stockum & Zoon.
- Ghani, M. A. (2016). *Jejak Planters di Tanah Deli*. Bogor: IPB Press.
- Hamerster, M. (1981). *Bijdrage tot de Kennis van de Afdeeling Asahan*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instituut.
- Hutauruk, A. F. (2020). *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam hingga Kolonialisme*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Indera & Suprayitno. (2004). “Pengaruh Pertumbuhan Industri Karet terhadap Kuli Kontrak di Sumatera Timur, 1904-1920.” E-USU Repository.
- Kartodirjo, S. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Knappert, L. (1908). *Memorie van Overgave van het Bestuur van de Afdeeling Asahan, Residentie Sumatra's Oostkust*.
- Lekkerkerker, C. (1916). *Land en Volk van Sumatra*. Leiden: E.J. Brill.
- Mubyarto & Dewanta, A. S. (1991). *Karet*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhajir, A., Anwar, S., & Sumantri, P. (2020). Jaringan Kereta Api sebagai Sarana Transportasi Pendukung Industri Perkebunan di Sumatera Timur: Peranan Deli Maatschappij dan Deli Spoorweg Maatschappij, 1881-1940. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*. 1(1), 1-8.
- Padmo, S. 1999. Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa, 1900-1980. *Humaniora*, 12, 56-66.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sjamsu, M. A. (1956). *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi, 1905-1955*. Bandung: Djambatan.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Straub, M. (1928). *Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra*. Amsterdam: Uitgave van het Instituut.